



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 Ext. 5216; FAKSIMILE (021) 3846322
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- ~~486~~ /PB/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan kemungkinan gangguan proses pelayanan pencairan dana pada KPPN yang ikut serta dalam tahap *Piloting* SPAN

23 Januari 2014

Yth. Para Sekretaris Jenderal
Kementerian/Lembaga

Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel, aman dan mudah diterapkan yang didukung dengan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi, maka Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan mengimplementasikan sistem keuangan terintegrasi yang diberi nama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
2. Saat ini pelaksanaan SPAN telah memasuki tahap *Piloting*, yang sejak tanggal 2 Januari 2014 yang lalu sudah dimulai di beberapa unit pelaksana lingkup Kementerian Keuangan RI dan dua KPPN yang berada di Jakarta, yaitu KPPN Jakarta II dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
3. Selanjutnya mulai tanggal 3 Februari 2014 *Piloting* SPAN juga akan dilaksanakan pada unit pelaksana lingkup Ditjen Perbendaharaan yang lain dengan rincian lokasi sebagai berikut :
 - a. *Piloting* SPAN Tahap IIA (mulai tanggal 3 Februari 2014)
Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat (13 *sites*), Kanwil DJPB Provinsi DI Yogyakarta (4 *sites*), Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur (16 *sites*), KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta V
 - b. *Piloting* SPAN Tahap IIB (mulai tanggal 17 Februari 2014)
Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara (12 *sites*), Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur (7 *sites*), dan Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan (10 *sites*)
4. Sehubungan dengan kegiatan *Piloting* SPAN tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa akan terdapat kemungkinan gangguan dalam proses pencairan dana pada satuan kerja lingkup kerja saudara yang dilayani oleh KPPN-KPPN lingkup Kanwil DJPB tersebut pada poin 3, selama proses *Piloting* berlangsung.
5. Oleh karena hal tersebut di atas, kami meminta maaf sebesar-besarnya dan mohon kerjasamanya demi perbaikan sistem pengelolaan APBN dimasa yang akan datang.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryo
NIP. 195906061983121001

Tata Usaha Menteri

No: 222 /ASLI/SEKJ/ 2014

TGL: 9 / 02 / 2014 11.30